



PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BALANGAN

TAHUN
2025

Jl. Ahmad Yani Km 4,5 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kode Pos 71662
Telp. (0526) 2029523 Email. disperindagblg@gmail.com



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Ahmad Yani Km 4,5 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kode Pos 71662
Telp. (0526) 2029523 Email. disperindagblg@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR : 050.24/024/SK/DISPERINDAG-BLG/2025

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2025**

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025;
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal beserta pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 17 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas,

HERLINA S.Sos, MM
Pembina – (VI/a)
NIP. 19701205 199603 2 003

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 050.24/024 /SK/DISPERINDAG-BLG/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
BALANGAN TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dapat diselesaikan dan ditetapkan di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Nomor: 050.24/ /SK/DISPERINDAG-BLG/2024 pada tanggal Juni 2025.

Dalam rangka untuk menunjang visi misi Bupati/Wakil Bupati Balangan tahun 2025-2029 yaitu **"BALANGAN BAHARAT (*Membangun Desa, Menata Kota Menuju Masyarakat yang Harmonis, Religius, Maju dan Sejahtera*)"**. Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan melaksanakan kegiatan dan mengampu pekerjaan dari sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami sangat mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan Perubahan Renja ini agar dapat dijadikan pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2025.

Harapannya, semoga penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini bermanfaat bagi pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di Kabupaten Balangan.

Paringin, Juni 2025
Plt. Kepala Dinas,

HERLINA, S. Sos, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19701205 199603 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Indikator s/d Triwulan I Tahun 2024.....	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2024	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	40
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH....	46
4.1 Analisa Sosial Ekonomi.....	46
4.2 Program dan Kegiatan	49
BAB V PENUTUP.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan s/d Triwulan I Tahun 2025	5
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.....	16
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Balangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.....	27
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2025 ini merupakan dokumen komprehensif berwawasan 1 (satu) tahun. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan serta perwujudan program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Kabupaten Balangan untuk lima tahun ke depan.

Penyusunan Perubahan Renja ini memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di tahun 2025 dengan fokus utama adalah Meningkatnya PAD Sektor Perdagangan dan Pendapatan IKM Pengolahan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dalam pelaksanaan sampai dengan triwulan I pada tahun perencanaan atau tahun berjalan ini telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja tahun 2025. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan ke satu tahun 2024, dimana beberapa poin yang ditemukan, antara lain sebagai berikut :

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan penganggaran daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Perlunya dilakukan pergeseran anggaran antar program, kegiatan maupun antar jenis belanja serta perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran kegiatan;
3. Adanya kegiatan baru yang harus ditampung dalam perubahan tahun 2025 sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi Kabupaten Balangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Renja tahun 2025. Hal ini agar konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan pencapaian visi dan misi lebih efektif dan efisien.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan ini merujuk pada :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.
6. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

7. Peraturan Bupati Balangan Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk memberikan arah perencanaan, kebijakan dan program satuan kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan pada tahun 2025. Dengan tujuan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan di tahun 2025 yang sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Indikator s/d Triwulan I Tahun 2025
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Analisa Sosial Ekonomi
- 4.2 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Indikator s/d Triwulan I Tahun 2025

Dinas Perindustrian Kabupaten Balangan pada tahun 2025 secara keseluruhan melaksanakan 10 Program, 9 Program termasuk dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat mutlak bagi pengukuran kinerja dari keberhasilan/kegagalan program tersebut. Secara keseluruhan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan telah menetapkan kelompok indikator kinerja untuk masing-masing program tersebut, walaupun untuk beberapa program indikator kinerja *outcome*-nya belum seluruhnya dapat diukur tingkat capaiannya, sehingga ada beberapa program yang menggunakan indikator sasaran sebagai tolok ukur untuk menilai capaian kinerja, Indikator sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan s/d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 +7+9)	11 = (10/4)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	82.20	72.15	78.20	72.15	92.26	80.40	72.15	89.74
	PERSENTASE TEMUAN BPK YANG DITINDAKLANJUTI	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
	NILAI SKM PERANGKAT DAERAH	95.50	88.37	88.30	90.80	102.83	90.00	90.8	100.89
	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	14	7	2	2	100.00	11	9	81.82
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	32	17	5	5	100.00	27	22	81.48
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4	0	0	0	0.00	2	-	0.00
	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	3178	1520	437	437	100.00	2.506	1.957	78.09
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Dokumen)	84	48	12	12	100.00	72	60	83.33
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi	50	9	60	62	103.33	98	71	72.45

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SID DENGAN TAHUN (N-3) TH 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH SID TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SID TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023 10 = (5 + 7 + 9)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
			4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
Administrasi Umum perangkat daerah		3 Peraturan Perundang-Undangan (Orang) Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	7	4	1	1	100.00	6	5	83.33
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	35	20	18	18	100.00	43	38	88.37
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3	0	1	1	100.00	2	1	50.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	14	8	2	2	100.00	12	10	83.33
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	21	10	3	3	100.00	16	13	81.25
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	7	4	1	1	100.00	6	5	83.33
Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan (%)	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	18	0	13	7	53.85	7	7	100.00
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	51	9	0	0	0.00	23	9	39.13
Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	7	4	1	1	100.00	6	5	83.33

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	7	4	1	1	100.00	6	5	83.33
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	55	38	50	50	100.00	55	50	90.91
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	100	170	92	92	100.00	97	92	94.85
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	4	1	1	1	100.00	3	2	66.67
Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	6	2	2	2	100.00	4	4	100.00
PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PASAR DI KABUPATEN BALANGAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAYAKAN PASAR (%)	30.00	20.00	10.00	2.05	20.45	32	22.05	68.79
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang direvitalisasi (%)	100	70	83.33	80.00	96.00	91.67	80.00	87.27
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	27	13	7	8	114.29	4	21	525.00
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	12	5	10	10	100.00	11	10	90.91
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pedagang yang Berjualan pada Tempatnya (%)	100	63.36	70.00	69.31	99.02	80.00	69.31	86.64
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	5	2	1	1	100.00	4	3	75.00

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	5	2	1	1	100.00	4	3	75.00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKU USAHA EKSPOR (%)	100	10.00	50.00	0	0.00	70.00	10.00	14.29
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Tujuan Ekspor (%)	100	0.00	33.33	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00
Pameran Dagang Nasional	Jumlah Calon Pelaku Usaha Ekspor yang Memenuhi Syarat (Orang)	15	0	5	3	60.00	10	3	30.00
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang (Pelaku Usaha)	15	10	15	15	100.00	15	15	100.00
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	15	0	4	3		5	3	60.00
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina (Pelaku Usaha)	3	1			0.00	3	1	33.33
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUK LOKAL (%)	25	0	7.88	52.77	669.61	21.74	52.77	242.71
	Nilai Transaksi Promosi Perdagangan (Rupiah)	2,100,000,000	706,972,000	1,380,000,000	1,080,007,200	78.26	1,680,000,000	1,080,007,200	64.29
	Persentase Produk Lokal Perdagangan yang Berkualitas (%)	45.45	58.33	33.33	47.37	142.12	37.50	47.37	126.32
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perforerian dan jasa akomodasi (UMKM)	10	19			0.00	10	19	190.00
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan (Dokumen)	1	1			0.00	1	1	100.00
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk	35	0			0.00	28	0	0.00

URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SID DENGAN TAHUN (N-3) TH 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH SID TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SID TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM) Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan ritel, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	20	0	20	20	100.00	20	20	100.00
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (%) PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DILAKSANAKAN (%)	20	16.80	17.85	23.63	132.37	18,42	23.63	0.00
	Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan (Buah)	100	0	100	100	100.00	100	100	100.00
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	90	0	50	9	18.00	70	9	12.86
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang (Buah)	4	1	1	1	100.00	3	2	66.67
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	7	1	3	3	100.00	5	3	60.00
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri (Buah)	7	1	3	3	100.00	5	3	
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		13	6	9	0	0.00	11	6	54.55

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SID DENGAN TAHUN (N-3) TH 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENTJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENTJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2023	REALISASI RENTJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENTRA (%)
2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	13	6	9	0	0.00	11	6	54.55
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri (Buah)	1	0			0.00	0	0	0.00
Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri (Dokumen)	1	0			0.00	0	0	0.00
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C (Buah)	7	0			0.00	0	0	0.00
Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	7	0			0.00	0	0	0.00
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Sesuai Ketentuan (Kali)	9	0	3	1	33.33	3	1	33.33
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	9	0	3	1	33.33	3	1	33.33

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUTS) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENJTA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) (Buah)	3	0	1	0	0.00	1	0	0.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	3	0	1	0	0.00	1	0	0.00
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE STABILITAS DAN JUMLAH KETERSEDIAAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK (%)	6.80	7.51	7.40	6.52	88.11	7.00	6.52	93.14
Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Kali)	410	190	66	67	101.52	330	257	77.88
	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah (Kali)	182	91	65	68	104.62	191	159	83.25
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	12	0	12	12	100.00	12	12	100.00
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	84	48			0.00	60	48	80.00
Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	7	4	1	1	100.00	6	5	83.33
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN (%)	84.61	61.11	69.23	60.98	88.08	76.92	60.98	0.00
	PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN (%)	33.33	20.69	25	21.95	87.80	29.16	21.95	0.00
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah SDM Kemetrologian yang memperoleh sertifikasi teknis (Orang)	14	9	1	2	200.00	13	11	84.62

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
	Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah (Buah)	1500	1034	1300	1268	97.54	1.400	1268	90.57
	Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perengkapannya (UTTP) dan BDKT yang diawasi dan sesuai ketentuan (Buah)	170	98	150	175	116.67	160	175	109.38
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan di era ulang (Unit)	1500	1034	1300	1268	97.54	1.400	1268	90.57
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dibina (Orang)	350	201	50	44	88.00	295	245	83.05
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI (%)	15	12.39	13	13.16	101.26	14.00	13.16	0.00
Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Memiliki SDM yang Bersertifikasi Sesuai Kebutuhan (IKM)	5	0	5	2	40.00	5	2	40.00
	Jumlah IKM yang Memiliki Teknologi (IKM)	375	300	325	325	100.00	350	325	92.86
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3	0	0	0	0.00	1	-	0.00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	7	4	1	1	100.00	6	5	83.33
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA, INDUSTRI	PERSENTASE PERTUMBUHAN IKM (%)	2.18	1.68	1.98	1.98	100.13	2.11	1.98	0.00
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SiINas)	Jumlah IKM yang Memiliki Izin (IKM)	160	46	82	131	159.76	120	131	109.17

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah-tinggi dan tinggi, melalui SINas yang terintegrasi dengan sistem OSS (Dokumen)	4	4	0	0	0.00	4	4	100.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab/ Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3	0	0	0	0.00	1	-	0.00
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	7	4	1	1	100.00	6	5	83.33
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERSENTASE SKALA USAHA IKM YANG BERKEMBANG (%)	3.58	0.58	1.58	1.58	99.97	2.58	1.58	0.00

Pada Tabel 2.1 disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025. Jika dilihat dari tingkat penyerapan anggaran pada kegiatan-kegiatan Belanja Daerah untuk tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.051.443.398,- atau 5,51% dari total anggaran keseluruhan sebesar Rp. 19.070.189.159,- (APBD).

Permasalahan anggaran cukup menjadi kendala tersendiri mengingat ketersediaan anggaran belum mencukupi kebutuhan/pengajuan anggaran dari Perangkat Daerah, sehubungan dengan hal tersebut pelaksanaan program dan kegiatan akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Permasalahan lain yang timbul adalah tidak adanya penurunan masa manfaat kendaraan dinas jabatan kepala dinas sebagai sarana transportasi mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dengan kegiatan antara lain, koordinasi, konsultasi, pengumpulan data, penyuluhan metrologi legal, pembinaan, evaluasi dan monitoring yang mobilitasnya cukup tinggi selain itu mengingat jangkauan dan pelaksanaan cukup luas dan padat seringkali mengalami kendala sehingga mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 telah melaksanakan sebagian kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat melalui Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan ada yang telah sesuai target yang ditetapkan, kinerja untuk masing-masing Urusan Pemerintahan yang diampu oleh SKPD. Untuk lebih jelas terkait rincian pencapaian kinerja pelayanan yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Balangan

Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi						Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan			5.50	3.84	6.40	6.50	5.97	5.50	3.84	4.16	4.30	6.60	6.70		
Kontribusi PDRB Sektor Industri			1.90	1.29	1.99	2.00	1.98	1.90	1.29	1,26	1.27	2.01	2.02		
Peningkatan Volume Perdagangan (Miliar Rupiah)			671.41	751.05	791.2	831,350	640.39	671.41	751.05	867.76	935.08	982,267	1,031,381		
Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan			0.1440	0.0567	0.0480	0,0549		0.1440	0.0567	0.0799	0.1275	0.1925	0.2575		
Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat					1.18	1,68				1.18	1.70	2.31	2.94		
Persentase Pasar di Kabupaten Balangan yang Memenuhi Standar					0.45	22.05				0.45	22.05	27.05	32.05		

Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi					Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Kelayakan Pasar (%)																
Cakupan promosi perdagangan dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan (%)												14.29	14.29			
Persentase Peningkatan Nilai Produk Lokal (%)						7.88					52.77	55.55	4.88			
Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (%)			8.42	9.84	12.00	17.85	4.80	8.42	9.84	16.80	23.63	26.54	29.34			
Persentase Jumlah Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi,						100.00					100	100	100			

Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi						Proyeksi			Catatan Analisis								
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
			Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp			Rp		Rp		Rp		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Dilaksanakan (%)																										
Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (%)			7.85	6.10	7.60	7.40	8.08	7.85	6.10	7.51	6.52	7.00	6.80													
Persentase Jumlah Kegiatan Metrologi Legal Dilaksanakan (%)			61.53	69.23	61.53	69.23	46.15	61.53	69.23	61.11	60.98	76.92	70.00													
Persentase Jumlah Kegiatan Pengawasan Metrologi Legal Dilaksanakan (%)					20.83	25.00				20.69	21.95	29.16	25.00													
Persentase IKM yang Menerapkan Teknologi Industri (%)			6.81	10	12	13.00	4.10	6.81	10	12.39	13.16	14.00	14.55													

Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi					Proyeksi			Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Persentase iKM yang tertib laporan (%)						12.00						12.00	15.00	17.00	
Persentase produk iKM yang di promosikan (%)						66.67						66.67	66.67	66.67	

Bidang Perindustrian sampai dengan triwulan I tahun 2025 telah melaksanakan partisipasi dalam kegiatan pameran Inacraft, Inacraft merupakan salah satu event nasional terbesar di Indonesia yang berlangsung pada tanggal 05 hingga 09 Februari 2025 di Jakarta International Convention Center, dengan tema "The Cosmological Axis of Yogyakarta Living in Harmony"

Untuk Urusan Perdagangan pada sektor sarana dan prasarana perdagangan sampai dengan triwulan I 2025. Pertama, telah melaksanakan pembangunan/rehab/perbaikan pasar melalui program peningkatan sarana distribusi perdagangan, antara lain:

1. Perencanaan revitalisasi mushola dan kantor pengelola Pasar Batumandi.
2. Pekerjaan penambahan lapak pada Pasar Modern Paringin setelah diskusi lebih intens lagi dipandang tidak mendesak jadi akan dilakukan perubahan menjadi revitalisasi halaman pasar iwak.

Seialin itu juga telah melaksanakan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sampai dengan triwulan I 2025 melalui :

1. Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan melalui UPTD Pasar telah menyelenggarakan kegiatan pasar ramadhan 1446 H selama 30 hari terhitung tanggal 01 Maret 2025 sampai dengan 30 Maret 2025 yang diikuti sebanyak 141 UMKM. Kegiatan berupa fasilitasi tenda yang diberikan kepada para peserta secara gratis, fasilitasi tenda kerucut dengan 3 x 3 m sebanyak 20 tenda, dan tenda biasa 6 x 4 m sebanyak 28 tenda.
2. Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan berupa Penataan Pedagang di lingkungan pasar dengan membentuk tim penataan pedagang di kabupaten balangan yang terdiri dari unsur Disperindag, UPTD Pengelola Pasar, Kecamatan Se-kabupaten Balangan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Polres Balangan, Dandim dan Kejaksaan.
Pada triwulan 1 tepatnya di bulan Februari sudah dilaksanakan Penataan Pedagang Bersama Tim Penataan di Pasar Modern Paringin, selain penataan regular yang dilakukan oleh UPTD Pengelola Pasar.

3. Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan berupa kegiatan membangun komunikasi dengan asosiasi/paguyuban pedagang. Kegiatan ini rencana akan dilaksanakan pada triwulan 3 tahun 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung pasar, mengingat pasar merupakan sentra perdagangan yang ada di Kabupaten Balangan.

Dalam hal pembinaan pelaku usaha perdagangan melalui:

1. Program pengembangan ekspor, antara lain:
 - a. Fasilitasi pelaku usaha UMKM dalam pameran dagang dalam event balangan expo sebanyak 115 (seratus empat belas) UMKM.
 - b. Misi dagang bagi produk ekspor unggulan berupa rencana penyusunan bahan persentasi 5 (lima) UMKM yaitu Gula semut, anyaman purun, anyaman tirik, sasirangan dan produk makanan. Produk tersebut akan dipresentasikan dalam agenda kegiatan mengikuti trade meeting of south Kalimantan province 2025 pada Bulan Juni di Jakarta.
2. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri berupa penjangkaran pelaku usaha UMKM baru untuk difasilitasi dalam melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi.

Urusan Perdagangan pada sektor Kemetrollogian dan Stabilisasi Harga sampai dengan Maret 2025 telah melaksanakan pertama, kegiatan pendataan harga bahan pokok dan barang penting sebanyak 20 kali di 4 (empat) pasar, yaitu pasar modern adaro, pasar batumandi, pasar bihara dan pasar halong guna mengukur tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok. Dalam rangka penanganan inflasi di daerah telah dilaksanakan kegiatan menggelar pasar murah sebanyak 13 kali, yang terbagi menjadi 2 (dua) kegiatan pasar sebagai berikut :

1. Pasar Murah Reguler

No	Tanggal	Desa	Kecamatan
1	11 Februari	Halaman Kantor Kecamatan Juai	Juai
2	12 Februari	Halaman Kantor Kecamatan Paringin	Paringin
3	18 Februari	Halaman Kantor Kecamatan Awayan	Awayan
4	19 Februari	Lajar	Lampihong

No	Tanggal	Desa	Kecamatan
5	04 Maret 2025	Telaga Purun	Paringin Selatan
6	06 Maret 2025	Tawahan	Juai
7	11 Maret 2025	Bangkal	Halong
8	12 Maret 2025	Halaman Polres Balangan	Paringin Selatan
9	13 Maret 2025	Gunung Batu	Tebing Tinggi
10	18 Maret 2025	Lampihong Kanan	Lampihong
11	19 Maret 2025	Bungin	Paringin Selatan
12	20 Maret 2025	Muara Jaya	Awayan

2. Pasar Murah Khusus (HKBN)

No	Tanggal	Desa	Kecamatan
1	14 Maret 2025	Desa Mampari	Batumandi

Kedua, kegiatan Metrologi Legal yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan I 2025 sebagai berikut:

1. Penyuluhan Metrologi Legal

No	Nama Kegiatan	Waktu	Lokasi/Objek Kegiatan	Hasil Kegiatan
1	Penyuluhan Metrologi Legal	25 Februari 2025	Kecamatan Tebing Tinggi	43 Pelaku Usaha Di Bidang Metrologi Legal Yang dibina

2. Rapat Persiapan Pelaksanaan Tera Ulang

No	Nama Kegiatan	Waktu	Lokasi/Objek Kegiatan	Hasil Kegiatan
1	Rapat Persiapan Tera Ulang	18 Maret 2025	Timbangan Jembatan milik PT. Paramitha Cipta Sarana (Balangan Coal)	1 Rencana teknis tera ulang untuk timbangan jembatan 200 ton dan 60 ton

3. Pelayanan Tera atau Tera Ulang

No	Nama Kegiatan	Waktu	Lokasi/Objek Kegiatan	Hasil Kegiatan
1	Tera Ulang Keliling Desa (LATEKS)	26 Februari 2025	Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi	36 Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang ditera ulang dan bertanda tera sah
2	Tera Ulang PU BMM Pertashop	11 – 14 Februari 2025	Pertashop PT. Borneo Anugrah Insanindo 1. Desa Teluk Karya	5 Pompa Ukur BBM Ditera Ulang dan Bertanda Tera sah

No	Nama Kegiatan	Waktu	Lokasi/Objek Kegiatan	Hasil Kegiatan
			2. Desa Lampihong Selatan 3. Desa Mungkur Uyam 4. Desa Baruh Panyambaran Desa Bihara Hilir	
3	Tera PUBBM SPBU	12 Februari 2025	SPBU PT. Mustafa Kamal (SPBU Rica)	2 buah PU BBM ditera dan bertanda tera sah
4	Layanan Tera Kantor	28 Februari dan 3 Maret 2025	Timbangan Dacin Milik Siti Jaleha	3 buah UTTP ditera ulang dan bertanda tera sah

4. Pengawasan Metrologi Legal

No	Nama Kegiatan	Waktu	Lokasi/Objek Kegiatan	Hasil Kegiatan
1	Pengawasan Metrologi Legal	11 Maret 2025	Produk BDKT Minyak Goreng "Minyak Kita"	1 Produk BDKT yang diawasi sesuai ketentuan
2	Pengawasan Metrologi Legal	19 Maret 2025	SPBU PT. Mustafa Kamal (SPBU Rica)	9 PU BBM SPBU yang diawasi sesuai ketentuan
3	Pengawasan Metrologi Legal	20 Maret 2025	Produk BDKT Beras "SPHP Bulog" dari Supplier Pasar Murah	10 Produk BDKT yang diawasi sesuai ketentuan
4	Pengawasan Metrologi Legal	21 Maret 2025	Produk BDKT Beras "SPHP Bulog" dari Toko Rizqina Kecamatan Paringin	tidak Produk BDKT yang diawasi sesuai ketentuan

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam upaya terhadap pencapaian sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan serta capaian terhadap target dari program prioritas RPJMD ada beberapa hambatan serta permasalahan yang kami hadapi saat ini sehingga berpengaruh pada pencapaian target kinerja SKPD kami, yang secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Secara garis besar ada beberapa permasalahan yang kami hadapi sampai dengan triwulan I tahun 2025 ini, antara lain :

1. Masih kurangnya tenaga aparatur di masing-masing bidang sehingga pendataan/ pemetaan terhadap pelaku usaha industri/ pelaku usaha/ pedagang sebagai bahan informasi untuk pertumbuhan wirausaha baru sedikit terhambat.
2. Masih kurangnya produk lokal yang mampu bersaing dipasar global antara lain karena kemasan yang masih belum menarik/ tradisional serta ketersediaan bahan baku yang kadang sulit di dapat dalam jumlah banyak untuk waktu yang singkat, sehingga membuat investor cenderung ragu untuk berinvestasi selain itu masih kurangnya promosi-promosi terhadap produk unggulan membuat produk unggulan tersebut kurang dikenal oleh masyarakat maupun calon investor.
3. Tidak adanya kendaraan mobil dinas operasional layak yang mendukung aktifitas kerja di lapangan.
4. Masih adanya peralatan yang belum dimiliki lengkap sebagai unit metrologi legal dalam pelaksanaan tera/ tera ulang di Kabupaten Balangan tahun ini.
5. Belum optimalnya pembinaan kepada pedagang dan pedagang masih melanggar aturan akan tata letak dagangan.

Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan perubahan renja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perlunya meningkatkan kembali pengembangan dan pemasaran terhadap produk lokal unggulan daerah.
2. Perlu terus dilakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi kewirausahaan bagi pelaku usaha (IKM) agar produk yang dihasilkan dapat berkelanjutan serta mampu bersaing dipasar global.
3. Perlunya pendataan pedagang yang lebih komprehensif sebagai data dasar pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perdagangan.
4. Perlunya perbaikan fasilitas sarana dan prasarana perdagangan.
5. Perlunya kendaraan mobil dinas operasional lapangan.
6. Perlunya pendataan potensi UTTP yang sudah dapat terlayani tera tera ulang dan pengawasan perdagangan agar konsumen terlindungi.

Dari uraian tersebut menjadi dasar dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran pada tahun 2025, yaitu perluasan dan penguatan akses pemasaran produk UMKM, Pembinaan dan peningkatan kompetensi bagi pelaku usaha IKM, Pembinaan dan penataan pedagang, Penyediaan dan fasilitasi sarana distribusi

perdagangan, kemetrolagian dan pengawasan kemetrolagian menjadi fokus untuk dilaksanakan.

Beberapa masalah dan tantangan pokok yang akan dihadapi ditahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Penerapan dan penguasaan teknologi masih sangat terbatas hal ini terlihat dari total 2469 IKM, baru 325 IKM atau sebesar 13,16% yang sudah mendapatkan pelatihan teknologi industri dari total seluruh IKM. Hal ini berdampak kepada biaya produksi menjadi mahal dan kualitas barang serta produk inovatif yang dihasilkan sangat terbatas.
2. Terbatasnya kemampuan pelaku usaha perdagangan dalam mengakses permodalan, memanfaatkan peluang pasar dan kemampuan SDM pelaku usaha sehinga menghambat pertambahan nilai transaksi sektor perdagangan (volume perdagangan).

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya saing IKM dalam penerapan teknologi industri dan bantuan alat produksi.
2. Meningkatnya kesadaran IKM dalam tetib pelaporan SIINas
3. Meningkatnya promosi produk IKM
4. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan.
5. Peningkatan tujuan pasar ekspor melalui pembinaan calon pelaku usaha ekspor dan pelaku usaha ekspor.
6. Peningkatan nilai transaksi perdagangan (volume perdagangan).
7. Peningkatan perlindungan konsumen.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025

Secara keseluruhan target kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun 2025-2029 dapat harapanya tercapai dengan baik, meskipun kemungkinan ada beberapa sasaran dari kegiatan yang tidak sepenuhnya dapat tercapai. Dalam dokumen ini memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program hasil review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD tahun 2025 beserta indikator kinerja, besaran target dan besaran dana yang dibutuhkan untuk masing-masing program yang merupakan

representasi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan, dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Balangan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan atau Pen ting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3	Indeks Kepuasan Layanan Keseekretariatan	88.25	Nilai	10,923,306,888	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9	Indeks Kepuasan Layanan Keseekretariatan	86.25	Nilai	11,234,900,438	14
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP (%)	100	%	41,325,000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP (%)	100	%	41,325,000	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	Dokumen	10,640,000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	Dokumen	21,520,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	5	Laporan	17,940,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	5	Laporan	17,940,000	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2	Dokumen	12,745,000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2	Dokumen	1,865,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu (%)	100	%	8,478,864,338	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu (%)	100	%	8,478,865,588	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan	546	Orang/Bulan	7,777,689,146	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan	546	Orang/Bulan	7,777,690,396	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penertingan	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
				5	6					7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tunjangan ASN (Orang/Bulan)						Tunjangan ASN (Orang/Bulan)				
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Dokumen)	12	Dokumen	701,175,192	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Dokumen)	12	Dokumen	701,175,192	
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian (%)	100	%	314,520,000	Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian (%)	100	%	314,520,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	27	Orang	314,520,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	27	Orang	314,520,000	
	Administrasi Umum perangkat daerah		Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	%	659,758,100	Administrasi Umum perangkat daerah		Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	%	945,378,500	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Balangan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	1	Paket	12,573,500	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Balangan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	1	Paket	12,573,500	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Balangan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	5	Paket	197,568,100	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Balangan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	5	Paket	217,568,100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Balangan	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	1	Paket	32,476,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Balangan	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	1	Paket	32,476,000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Balangan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	2	Paket	29,962,400	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Balangan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	2	Paket	37,669,800	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang	3	Dokumen	8,301,600	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang	3	Dokumen	8,301,600	

No	Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Pen ting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)		
				5	6					7	8		9	
1	2	3	4			7	8	9	10			13	14	
			disediakan (Dokumen)						disediakan (Dokumen)					
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	1	Laporan	378,876,500	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	1	Laporan	636,789,500		
	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang (%)	100	%	151,254,100	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang (%)	100	%	151,249,700		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Balangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Balangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	Unit	-		
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Balangan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	14	Unit	151,254,100	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Balangan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	14	Unit	151,249,700		
	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP (%)	100	%	347,998,750	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP (%)	100	%	373,975,050		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	Laporan	157,199,150	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	Laporan	157,199,150		
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	1	Laporan	190,799,600	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	1	Laporan	216,775,900		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik (%)	100	%	929,586,600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik (%)	100	%	929,586,600		
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan	Kab. Balangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang	55	Unit	223,984,600	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan	Kab. Balangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang	55	Unit	223,984,600		

Rancangan Awal RKPD														Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Pen ting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)							
1	dinas atau kendaraan dinas jabatan	3	4 dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	5	6	7	8 dinas atau kendaraan dinas jabatan	9	10 dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	11	12	13	14						
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Balangan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	97	Unit	34,110,000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Balangan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	97	Unit	34,110,000							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kab. Balangan	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1	Unit	671,492,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kab. Balangan	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1	Unit	671,492,000							
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		PERSENTASE PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (%)	26.54	%	118,505,000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		PERSENTASE PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (%)	26.54	%	118,505,000							
			PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DILAKSANAKAN (%)	100	%				PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DILAKSANAKAN (%)	100	%								
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan (Buah)	11	Buah	35,942,500	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan (Buah)	11	Buah	44,218,000							
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan	Kab. Balangan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang dikeluarkan (Buah)	1	Dokumen	35,942,500	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan	Kab. Balangan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang dikeluarkan (Buah)	1	Dokumen	44,218,000							

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Pen-ting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)				Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)				
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang (Buah)	4	Buah	28,090,000	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang (Buah)	4	Buah	19,890,000	
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	4	Dokumen	28,090,000	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	4	Dokumen	19,890,000	
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri (Buah)	11	Buah	20,642,500	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri (Buah)	11	Buah	18,001,000	
	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik (Dokumen)	11	Dokumen	20,642,500	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik (Dokumen)	11	Dokumen	18,001,000	
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Pengawasan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pelabelan Bahan Berbahaya Sesuai Ketentuan (Kali)	3	Kali	27,790,000	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Pengawasan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pelabelan Bahan Berbahaya Sesuai Ketentuan (Kali)	3	Kali	32,776,000	
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir	3	Laporan	27,790,000	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir	3	Laporan	32,776,000	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Pen ting	
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)						Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)				
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) (Buah)	1	Buah	6,040,000	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) (Buah)	1	Buah	3,620,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	1	Dokumen	6,040,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	1	Dokumen	3,620,000	
	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		PERSENTASE PASAR DI KABUPATEN BALANGAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAYAKAN PASAR (%)	27.05	%	2,064,992,600	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		PERSENTASE PASAR DI KABUPATEN BALANGAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAYAKAN PASAR (%)	27.05	%	2,141,470,300	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase Pasar yang direvitalisasi (%)	90.91	%	1,972,517,600	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase Pasar yang direvitalisasi (%)	90.91	%	2,036,995,300	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	11	Unit	574,004,400	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	11	Unit	516,506,400	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	11	Unit	1,398,513,200	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	11	Unit	1,520,488,900	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase Pedagang yang Berjualan pada Tempatnya (%)	74.31	%	92,475,000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase Pedagang yang Berjualan pada Tempatnya (%)	74.31	%	104,475,000	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	1	Dokumen	62,250,000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	1	Dokumen	74,250,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	1	Dokumen	30,225,000	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	1	Dokumen	30,225,000	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		PERSENTASE STABILITAS DAN JUMLAH KETERSEDIAAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK (%)	7.00	%	917,667,200	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		PERSENTASE STABILITAS DAN JUMLAH KETERSEDIAAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK (%)	7.00	%	975,430,800	
	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Kali)	73	Kali	917,667,200	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Kali)	73	Kali	975,430,800	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	12	Laporan	106,117,200	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	12	Laporan	142,840,800	
	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	Laporan	811,550,000	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	Laporan	832,590,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		CAKUPAN PROMOSI PERDAGANGAN DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK	14.29	%	167,685,900	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		CAKUPAN PROMOSI PERDAGANGAN DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK	14.29	%	236,883,500	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Pen-ting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		EKSPOR UNGGULAN (%)				Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		EKSPOR UNGGULAN (%)					
			Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekspor (%)	70.00	%	167,685,900			Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekspor (%)	70.00	%	236,883,500		
			Jumlah Calon Pelaku Usaha Ekspor yang Memenuhi Syarat (Orang)	10	Orang				Jumlah Calon Pelaku Usaha Ekspor yang Memenuhi Syarat (Orang)	3	Orang			
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Balangan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	5	Pelaku Usaha	167,685,900	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Balangan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	5	Pelaku Usaha	236,883,500		
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN (%)	76.92	%	316,995,200	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN (%)	76.92	%	380,014,900		
			PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN (%)	29.16	%				PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN (%)	29.16	%			
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Ulang dan Pengawasan		Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang berlaku (%)	36.00	Buah	316,995,200	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Ulang dan Pengawasan		Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang berlaku (%)	36.00	Buah	390,014,900		
			Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang diawasi dan sesuai ketentuan (Buah)	150	Buah				Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang diawasi dan sesuai ketentuan (Buah)	150	Buah			
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Ulang	Kab. Balangan	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat	1,000	Unit	202,547,200	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Ulang	Kab. Balangan	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat	1,000	Unit	218,246,900		

Rancangan Awal RKPD													Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Pen ting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
			perencanaan ditera ulang (Unit)						perencanaan ditera ulang (Unit)								
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Balangan	Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dibina (Orang)	50	Orang	114,448,000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Balangan	Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dibina (Orang)	50	Orang	171,768,000					
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUK LOKAL (%)	55.55	%	1,455,133,100	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUK LOKAL (%)	55.55	%	1,481,508,000					
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Nilai Transaksi Promosi Perdagangan (Rupiah)	1,680,000,000	Rupiah	1,455,133,100	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Nilai Transaksi Promosi Perdagangan (Rupiah)	1,680,000,000	Rupiah	1,481,508,000					
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	28	UMKM	1,455,133,100	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	28	UMKM	1,481,508,000					
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI (%)	14.00	%	652,390,000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI (%)	14.00	%	702,390,000					
	Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri		Jumlah IKM yang Memiliki SDM yang Bersertifikasi Sesuai Kebutuhan (IKM)	5	IKM	652,390,000	Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri		Jumlah IKM yang Memiliki SDM yang Bersertifikasi Sesuai Kebutuhan (IKM)	5	IKM	702,390,000					
			Jumlah IKM yang Memiliki Teknologi (IKM)	350	IKM				Jumlah IKM yang Memiliki Teknologi (IKM)	350	IKM						
			Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri	0	%				Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri	38.13	%						
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan	1	Dokumen	238,994,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan	1	Dokumen	238,994,000					

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan ata n Pen ting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
				5	6					11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Sumber Daya Industri (Dokumen)						Sumber Daya Industri (Dokumen)				
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1	Dokumen	413,396,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1	Dokumen	463,396,000	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		PERSENTASE IKM YANG TERTIB LAPORAN (%)	15.00	%	133,214,000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		PERSENTASE IKM YANG TERTIB LAPORAN (%)	15.00	%	180,214,000	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah IKM yang Memiliki Izin (IKM)	120	IKM	133,214,000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah IKM yang Memiliki Izin (IKM)	120	IKM	180,214,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	Dokumen	85,409,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	Dokumen	132,409,000	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Pengeting	
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kab. Balangan	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	Dokumen	47,805,000	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kab. Balangan	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	Dokumen	47,805,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		PERSENTASE PRODUK IKM YANG DI PROMOSIKAN (%)	66.67	%	750,091,900	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		PERSENTASE PRODUK IKM YANG DI PROMOSIKAN (%)	66.67	%	1,162,091,900	
	Penyediaan informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Produk IKM yang dikurasi (Produk)	15	Produk	750,091,900	Penyediaan informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Produk IKM yang dikurasi (Produk)	15	Produk	1,162,091,900	
			Jumlah Produk IKM Bersertifikasi (IKM)	156	IKM				Jumlah Produk IKM Bersertifikasi (IKM)	156	IKM		
	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri, serta data lain lingkup	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri, data	1	Dokumen	161,955,000	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri, serta data lain lingkup	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri, data	1	Dokumen	161,955,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 ini dapat bersumber dari usulan SKPD, dari masukan pihak legislatif (DPRD) maupun aspirasi dari masyarakat dimana usulan-usulan Program dan Kegiatan tersebut telah dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan yang terkait dengan usulan yang bersumber dari sektor atau bidang Sosial Ekonomi biasanya meliputi usulan mengenai pemberdayaan masyarakat, pembinaan pelaku usaha dan bantuan peralatan usaha bagi pelaku usaha.

Semua usulan masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dan usulan dari pokok pikiran (Pokir) pihak legislatif/ DPRD akan diverifikasi dan apabila sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dan atau apabila memungkinkan akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan ketersediaan dana yang ada akan diakomodir pada program dan kegiatan perubahan pada tahun anggaran 2025.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Dalam rancangan akhir RPJPN 2025-2045, pentahapan Implementasi RPJPN 2025-2045 dilaksanakan dalam empat tahap rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) sebagai berikut:



Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 bertujuan untuk mewujudkan tranformasi indonesia menuju indonesia emas 2045. Termuat dalam delapan agenda pembangunan RPJPN 2025-2045 yaitu sebagai berikut:

1. Transpormasi Sosial



2. Transpormasi Ekonomi



3. Transpormasi Tata Kelola.



4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia.



5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.



6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.
7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Pembangunan dalam RPJMN 2025-2029 diarahkan untuk penguatan pondasi transformasi.

Dalam upaya menyeleraskan dengan visi Indonesia Emas 2045, Kementerian Perindustrian mengambil peran penting dalam Implementasi Industri 4.0 Akselerasi visi Indonesia 2045. agar industri manufaktur semakin produktif dan berdaya saing sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pengembangan industri manufaktur sebagai salah satu tahapan pembangunan nasional. "Industri sebagai tulang punggung perekonomian karena membawa *multiplier effect* yang cukup besar. Di antaranya adalah peningkatan pada nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal dan penerimaan devisa dari ekspor". Seiring berjalannya era ekonomi digital saat ini, industri perlu memanfaatkan teknologi manufaktur terkini dalam upaya peningkatan produksinya. Selanjutnya aktif pula melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan guna menciptakan inovasi. Lima sektor yang diprioritaskan dalam implementasi Industri 4.0, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik serta kimia.

Sedangkan Kementerian Perdagangan mengambil peran penting dalam peningkatan perdagangan berjangka komoditi serta mendorong penguatan perdagangan dalam dan luar negeri. Fokusnya adalah

peningkatan peran dalam rantai pasok komoditas serta ekosistem perdagangan di pasar lokal dan global, melalui penguatan perdagangan berjangka komoditi (PBK) dapat mendukung peningkatan ekspor komoditas dan menjaga inflasi, di samping sebagai fasilitas pembentukan harga acuan komoditas strategis Indonesia.

Dalam rangka sinkronisasi Program antara Program Nasional dengan Program Daerah, perlu dilakukan telaahan terhadap kebijakan nasional tersebut, oleh karena itu dalam penyusunan Perubahan Renja tahun 2025 kami memperhatikan pula prioritas dan program nasional. Adapun program yang akan kami rencanakan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan.
2. Peningkatan jumlah negara tujuan ekspor dan calon pelaku usaha ekspor.
3. Peningkatan perdagangan dari komoditi hasil pertanian.
4. Perkembangan megatrend global seperti persaingan sumber daya alam, teknologi, demografi, perdagangan internasional dan perubahan situasi geopolitik.
5. Perkembangan inflasi, resesi global, krisis pangan dan energi, serta perkembangan teknologi seperti AI dan metaverse.
6. Peningkatan kemampuan teknologi industri untuk mendorong peningkatan kegiatan pemerintahan daerah yang bersifat padat karya dalam rangka peningkatan pendapatan serta pengentasan kemiskinan.
7. Penguatan pengawasan izin usaha industri.
8. Penguatan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Secara khusus program arah kebijakan program prioritas dan kegiatan SKPD kami di tahun 2025 adalah pembinaan serta pendampingan IKM, meningkatkan pertumbuhan IKM baru/wira usaha baru (WUB), meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku usaha pedagang, peningkatan transaksi perdagangan (volume perdagangan), peningkatan perlindungan konsumen serta optimalisasi kualitas produk unggulan melalui pembinaan yang berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Secara umum tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tidaklah terlepas dari tujuan yang ingin dicapai Kabupaten Balangan selama lima tahun kedepan yang mana

tujuan tersebut telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan 2025-2029, yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan. Adapun secara khusus tujuan yang ingin dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan pada tahun 2025 adalah sebagai Meningkatnya PAD Sektor Perdagangan dan Pendapatan IKM Pengolahan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025 adalah :

1. Meningkatnya Produktivitas Perdagangan
2. Kondusifitas Perdagangan
3. Meningkatnya Perlindungan Konsumen
4. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Industri

Sasaran tersebut kami upayakan dalam rangka salah satu pencapaian sasaran Kabupaten Balangan yaitu Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan

Melalui pembinaan secara terus menerus terhadap IKM/ pelaku usaha/ pedagang agar berdaya saing guna mendukung Misi 2 dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan di Kabupaten Balangan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Analisa Sosial Ekonomi

Analisa dilakukan pada 2 urusan pemerintahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Melalui sosialisasi tata cara pengajuan permohonan surat rekomendasi dan atau fasilitasi permohonan perizinan elektronik terintegrasi berbasis resiko (OSS-RBA) untuk membantu masyarakat/pelaku usaha dalam mendapatkan surat keterangan izin usaha dan atau surat rekomendasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melalui kegiatan pendataan waralaba informasi pelaku usaha kemitraan waralaba yang ada di Kabupaten Balangan dikumpulkan sebagai bahan awal bagi Dinas/Bidang/Instansi terkait untuk meningkatkan kegiatan usaha waralaba, melaksanakan pembinaan serta monitoring keberlangsungan kemitraan usaha antara pemberi waralaba dengan pengusaha kecil dan menengah di Kabupaten Balangan.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Bertujuan untuk menunjang peningkatan sarana distribusi perdagangan (pasar) melalui beberapa kegiatan yaitu, pembangunan sarana distribusi perdagangan, revitalisasi atau perbaikan sarana distribusi perdagangan, pemeliharaan sarana distribusi perdagangan, pemberdayaan dan pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan serta penataan pedagang. Adapun dampak dan manfaat dari program, diantaranya :

Dengan melakukan pembangunan pasar atau revitalisasi pasar, akan dapat memperbanyak lapak/tempat pedagang yang dapat berjualan pada pasar tersebut. Melalui pengelolaan sarana distribusi perdagangan yaitu pemeliharaan, pembersihan dan pengawasan sarana distribusi perdagangan, fasilitas sarana

perdagangan yang telah ada dapat terpelihara dan tidak kumuh, nyaman saat berbelanja/bertransaksi serta kemudahan akses hingga tertatanya pedagang membuat pasar akan terlihat rapi. Pasar adalah salah satu titik penting dalam perekonomian sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli dan tempat perputaran uang.

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Kegiatan yang dilakukan untuk menstabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting jika sewaktu-waktu terjadi kenaikan harga/inflasi di daerah dengan langkah nyata berupa pelaksanaan kegiatan pasar murah dalam upaya membantu menjaga nilai daya beli masyarakat.

d. Program Pengembangan Ekspor

Memfasilitasi pelaku usaha dalam mengembangkan pemasaran produknya ke pasar yang lebih luas melalui pameran dagang yang dapat diikuti dan pelatihan ekspor. Program ini bertujuan menghimpun produk lokal dan unggulan daerah untuk dapat mempromosikan produknya. Diharapkan dapat membantu produk lokal dan unggulan daerah dalam mempromosikan dan memasarkan dengan difasilitasi untuk mengikuti pameran dagang dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan atau omset peserta pameran dagang serta menumbuhkan ekonomi kreatif.

e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Guna memberikan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha dengan terjaminnya kebenaran pengukuran/panakaran/penimbangan serta memastikan kebenaran pengukuran/panakaran/penimbangan dengan perlindungan hukum dan keadilan transaksi agar dapat meningkatkan saling kepercayaan dalam transaksi jual beli di masyarakat.

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Memfasilitasi produk lokal dan unggulan daerah dalam promosi dagang guna meningkatkan pendapatan pelaku usaha dan mengembangkan pemasaran produk lokal dan unggulan daerah yang dituangkan kedalam hubungan kerjasama (Mou) seperti kegiatan kerjasama dengan retail modern.

2. Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Perencanaan dan Pembangunan Industri melalui pelatihan IKM. Melalui pelatihan IKM diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dengan meningkatkan ketrampilan dalam proses produksi maupun peningkatan manajerial, IKM diajarkan untuk meningkatkan produktifitas produksi sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal. Pelatihan tidak hanya diajarkan tentang operasional dan teknis namun IKM juga diberikan pengertian tentang teknologi terbaru yang dapat digunakan untuk efisiensi kerja.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Pengendalian Izin Usaha Industri melalui sertifikasi halal gratis. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan melaksanakan kegiatan fasilitasi sistem jaminan halal (SJH) kepada IKM untuk didaftarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal produk olahannya. Karena dengan sudah memiliki sertifikasi halal produk memberikan banyak manfaat kepada peningkatan penjualan produk. Berikut beberapa manfaat dari sertifikasi halal bagi produsen. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari konsumen, karena dengan adanya label halal produk, maka konsumen tidak merasa khawatir dengan kandungan pada produk. Kedua, dapat meningkatkan luas jangkauan pemasaran, kepercayaan konsumen yang baik dapat meningkatkan jangkauan pasar dari produk olahan. Produk akan semakin dikenal dan menjadi pilihan oleh masyarakat luas. Dengan hal ini, produk memiliki peluang untuk memperluas jaringan pemasaran hingga ke daerah lain.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Dijaman era digitalisasi seperti sekarang banyak kebijakan pemerintah yang mengarah pada sistem pelayanan, perijinan dan pendataan secara online. Banyak para pelaku usaha Industri Kecil Menengah yang belum bisa melakukan secara mandiri, untuk menyikapi hal tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan memberikan fasilitasi kepada para Industri Kecil Menengah (IKM) untuk memperoleh perijinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB)

melalui aplikasi Online Single Submission (OSS), memfasilitasi pendaftaran melalui aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran Pelatihan Industri (SIMANIS) serta memfasilitasi pendaftaran dan pelaporan melalui aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan juga melakukan pendataan bagi para Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada diseluruh Kabupaten Balangan guna mempermudah untuk melakukan pembinaan dan mengukur tingkat produktivitas para IKM. Selain itu juga melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku usaha agar mendapatkan pemahaman lebih terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Bersama Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANASDA) Kabupaten Balangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan berusaha mewujudkan Industri Kerajinan Balangan yang mandiri dan berdaya saing berbasis sumber daya unggulan untuk mewujudkan ketahanan ekonomi daerah dengan cara mempromosikan hasil-hasil kerajinan IKM Balangan melalui partisipasi pameran-pameran baik skala kabupaten, provinsi maupun nasional. Selain itu juga melakukan pembinaan dan pelatihan guna meningkatkan kreativitas para pengrajin sehingga mereka mampu berinovasi dan terus meningkatkan kualitas hasil kerajinan mereka.

4.2 Program dan Kegiatan

a. Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Program Perangkat Daerah merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Penyusunan Perubahan Renja tahun 2025 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan Triwulan I tahun 2025.
2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan Triwulan I tahun 2025.
3. Prioritas pengembangan sektor Perindustrian dan sektor Perdagangan yang diwujudkan dalam kegiatan.

b. Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025

Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025 disusun mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025-2029 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2025-2029. Pergeseran anggaran antar kegiatan maupun antar jenis belanja, penambahan atau pengurangan anggaran dan penambahan atau penghapusan kegiatan sebagai akibat dari perkembangan keadaan yang tidak sesuai.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 10.640.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 21.520.000,-
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 12.745.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 1.865.000,-
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 7.777.689.146,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 7.777.690.396,-
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 197.568.100,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 217.568.100,-

- Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 29.962.400,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 37.669.800,-
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 378.876.500,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 636.789.500,-
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 151.254.100,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 151.249.700,-
- Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 190.799.600,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 216.775.900,-
- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 413.396.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 463.396.000,-
- Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 85.409.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 132.409.000,-
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 - Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 588.136.900,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 1.000.136.900,-

2. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

- Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 35.942.500,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 44.218.000,-
 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda daftar gudang dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 28.090.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 19.890.000,-
 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 20.642.500,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 18.001.000,-
 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2 (P-B2) dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 27.790.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 32.776.000,-
 - Penerbitan surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 6.040.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 3.620.000,-
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 574.004.400,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 516.506.400,-
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 1.398.513.200,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 1.520.488.900,-
 - Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 62.250.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 74.250.000,-
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
 - Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 106.117.200,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 142.840.800,-
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 811.550.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 832.590.000,-
- Program Pengembangan Ekspor

- Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 167.685.900,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 236.883.500,-
- Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 - Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 202.547.200,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 218.246.900,-
 - Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 114.448.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 171.768.000,-
- Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 1.455.133.100,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 1.481.508.000,-

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		10,923,306,888	11,234,900,438	311,597,950	
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		41,325,000	41,325,000	-	
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Balangan	10,640,000	21,520,000	10,880,000	
2	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi SKPD	Kab. Balangan	17,940,000	17,940,000	-	
3	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Balangan	12,745,000	1,865,000	(10,880,000)	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8,478,864,338	8,478,865,588	1,250	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	7,777,689,146	7,777,690,396	1,250	
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Balangan	701,175,192	701,175,192	-	
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		314,520,000	314,520,000	-	
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Balangan	314,520,000	314,520,000	-	
IV	Administrasi Umum perangkat daerah		659,758,100	945,378,500	285,620,400	
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Balangan	12,573,500	12,573,500	-	
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Balangan	197,568,100	217,568,100	20,000,000	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Balangan	32,476,000	32,476,000	-	
10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Balangan	29,962,400	37,669,800	7,707,400	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7			
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Balangan	8,301,600		8,301,600		-		
12	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Balangan	378,876,500		636,789,500		257,913,000		
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah		151,254,100		151,249,700		-		
13	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Balangan	-		-		-		
14	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Balangan	151,254,100		151,249,700		(4,400)		
VI	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		347,998,750		373,975,050		25,976,300		
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan	157,199,150		157,199,150		-		
16	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Balangan	190,799,600		216,775,900		25,976,300		
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah		929,586,600		929,586,600		-		
17	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Balangan	223,984,600		223,984,600		-		
18	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Balangan	34,110,000		34,110,000		-		
19	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Balangan	671,492,000		671,492,000		-		
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		118,505,000		118,505,000		-		
VIII	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		35,942,500		44,218,000		8,275,500		
20	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Balangan	35,942,500		44,218,000		8,275,500		
IX	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		28,090,000		19,890,000		(8,200,000)		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan
			(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7
21	Fasilitasi Penerbitan Tanda daftar gudang	Kab. Balangan	28,090,000	19,890,000	(8,200,000)	
X	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		20,642,500	18,001,000	(2,641,500)	
22	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Balangan	20,642,500	18,001,000	(2,641,500)	
XI	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten/Kota		27,790,000	32,776,000	4,986,000	
23	Pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2 (P-B2)	Kab. Balangan	27,790,000	32,776,000	4,986,000	
XII	Penerbitan surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		6,040,000	3,620,000	(2,420,000)	
24	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	Kab. Balangan	6,040,000	3,620,000	(2,420,000)	
	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		2,064,992,600	2,141,470,300	76,477,700	
XIII	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		1,972,517,600	2,036,995,300	64,477,700	
25	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	574,004,400	516,506,400	(57,498,000)	
26	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	1,398,513,200	1,520,488,900	121,975,700	
XIV	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		92,475,000	104,475,000	12,000,000	
27	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	62,250,000	74,250,000	12,000,000	
28	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	30,225,000	30,225,000	-	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		917,667,200	975,430,800	57,763,600	
XV	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		917,667,200	975,430,800	57,763,600	
29	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	106,117,200	142,840,800	36,723,600	
30	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	811,550,000	832,590,000	21,040,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		167,685,900	236,883,500	69,197,600	
XVI	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		167,685,900	236,883,500	69,197,600	
31	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Balangan	167,685,900	236,883,500	69,197,600	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		316,995,200	390,014,900	73,019,700	
XVII	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		316,995,200	390,014,900	73,019,700	
32	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Balangan	202,547,200	218,246,900	15,699,700	
33	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Balangan	114,448,000	171,768,000	57,320,000	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		1,455,133,100	1,481,508,000	26,374,900	
XVIII	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		1,455,133,100	1,481,508,000	26,374,900	
34	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	1,455,133,100	1,481,508,000	26,374,900	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		652,390,000	702,390,000	50,000,000	
XIX	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota		652,390,000	702,390,000	50,000,000	
35	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Balangan	238,994,000	238,994,000	-	
35	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Balangan	413,396,000	463,396,000	50,000,000	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		133,214,000	180,214,000	47,000,000	
XX	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		133,214,000	180,214,000	47,000,000	
37	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	85,409,000	132,409,000	47,000,000	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	
38	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kab. Balangan	47,805,000	47,805,000	-		
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		750,091,900	1,162,091,900	412,000,000		
XXI	Penyediaan informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		750,091,900	1,162,091,900	412,000,000		
39	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Balangan	161,955,000	161,955,000	-		
40	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	588,136,900	1,000,136,900	412,000,000		
	TOTAL		17,499,981,788	18,623,408,838	1,123,431,450		

BAB V PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun anggaran 2025 ini merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Balangan secara keseluruhan. Rincian daftar program dan kegiatan yang termuat dalam Perubahan Rencana Kerja tahun anggaran 2025 diupayakan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta tepat waktu. Selain **input** yang baik, hal yang juga penting untuk diperhatikan adalah kualitas pelaksanaan kegiatan. **Input** dan **proses** akan memberikan **benefit** dan **impact** kepada **output** maupun **outcome**, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu semua pihak terkait, khususnya jajaran aparat yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan perlu mencermati berbagai rambu dan petunjuk didalam melaksanakan tugas serta mengemban tanggungjawabnya. Pelaksanaan tugas harus fokus pada upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang secara tidak langsung juga akan berdampak pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang berupaya untuk mewujudkan Kabupaten Balangan dalam "Membangun Desa, Menata Kota Menuju Masyarakat yang Harmonis, Religius, Maju dan Sejahtera".

Kesadaran untuk secara terus-menerus memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja telah ditunjang dengan penganangan penerapan *Good Governance* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Momentum ini sangat relevan untuk dimanfaatkan dalam rangka *revitalisasi* diri maupun organisasi.

Paringin, Juni 2025
Plt. Kepala Dinas,

HERLINA, S. Sos, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19701205 199603 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Ahmad Yani Km 4,5 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kode Pos 71662
Telp. (0526) 2029523 Email. disperindagblg@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR : 050.24/038 /SK/DISPERINDAG-BLG/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
BALANGAN TAHUN 2025**

KEPALA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2025, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
10. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2025;

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;
- b. mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;

- c. melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;
- d. merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;
- e. melaksanakan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;
- g. melaporkan hasilnya pada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan selaku Pengguna Anggaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : April 2025

Rt. Kepala Dinas,


HERLINA, S.Sos, MM
Pembina Utama (VI/a)
NIP. 19701205 199603 2 003

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERIDAGANGAN KABUPATEN
BALANGAN
NOMOR : 050.24/ 038 /SK/DKUKMPP-BLG/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2025**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	HERLINA, S. Sos, MM NIP. 19701205 199603 2 003	Plt. Kepala Dinas	Penanggung jawab
2	SAHRIL, S.Kom NIP. 19851127201001 1 014	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Ketua
3	SYAHRIDHA ELYANI, S.Pi, M.P NIP. 19810123 200501 2 015	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan	Sekretaris
4	SAMSUL BAKHRI, S.Pd.I, MM NIP. 19831125 200801 1 006	Plt. Kepala Bidang Kemetrologian dan Stabilisasi Harga	Anggota
5	Hj. IDA ROSIYANTI, SE NIP. 19780620 200604 2 021	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota
6	SAMSUL BAKHRI, S.Pd.I, MM NIP. 19831125 200801 1 006	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7	EKA MAYA JURADA, SE NIP. 19751230 200604 2 020	Jf Analis Perdagangan Ahli Muda	Anggota
8	MAYDHILA SAPUTRI, S.Si NIP. 19840516 2009 2 009	Jf Pengawas Kemetrologian Ahli Muda	Anggota
9	ASBIT, SE NIP. 19810817 201503 1 001	Jf Analis Perdagangan Ahli Muda	Anggota
10	ARIEFANSYAH, A.Md NIP. 19811031 200604 1 015	Jf Analis Perdagangan Ahli Muda	Anggota
11	SUNTARI SRI REJEKI, ST,MT NIP. 19821019 200604 2 007	Jf Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	Anggota
12	ALFIAN NOOR, S.Sos NIP. 19781219 201001 1 012	Jf Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	Anggota
13	NURLIANA, AMK NIP. 19860224 200904 2 002	Kepala UPTD Pasar	Anggota

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : April 2025

Plt. Kepala Dinas,

HERLINA, S.Sos, MM
Pembina Utama (VI/a)
NIP. 19701205 199603 2 003